

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hubungan positif antara satu negara dengan negara lain sangat dibutuhkan mengingat tidak hanya karena kondisi masing-masing negara memiliki kelebihan sekaligus kekurangannya, namun di era globalisasi yang tidak dinafikan masih terdapat pro dan kontra dalam hal itu disadari atau tidak kini telah menjadi arus dunia. Termasuk dikawasan Asia Tenggara.

Hubungan positif dengan adanya kerjasama yang transparan juga menandakan adanya kemenangan diplomatis dari pada sekedar kekerasan yang masih menandai hubungan antar bangsa di akhir milenium ke-2.

Tentu saja hubungan positif idealnya akan jauh dari apa yang diistilahkan dengan kekerasan baik kekerasan fisik seperti perang, perusakan terhadap suatu objek, ataupun kekerasan non fisik baik seperti pelecehan terhadap harga diri suatu bangsa, ataupun pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjadi konsekuensi universal yang seharusnya diterapkan oleh semua negara dalam menjalani hubungan internasionalnya.

Di kawasan Asia Tenggara memang tidak sepanas kawasan Timur Tengah maupun kawasan lainnya yang dengan kekerasan fisik masih melibatkan negara, namun diawal millennium ke-3 ini masih saja terjadi pelanggaran HAM yang menandakan diplomasi antara negara yang ditindaklanjuti dengan berbagai

masalah utama di kawasan ini yaitu kasus penanganan buruh migran.

Berbicara mengenai buruh migran di Asia Tenggara, orang pasti akan menunjuk Indonesia yang mempunyai penduduk terpadat dikawasan ini sekaligus memiliki tenaga kerja yang murah yang siap ditarik sebagai pekerja industri di negara tetangganya yang giat melakukan industrialisasi terutama diakhir dan awal millenium ini.

Dan kenyataannya diantara Indonesia terutama dengan Malaysia memiliki hubungan yang signifikan termasuk mengenai masalah perburuhan ini. Dan lebih parahnya lagi kasus HAM seputar tenaga kerja masih menjadi pembicaraan yang serius antara kedua negara di kawasan strategis Benua Asia ini.

Indonesia dan Malaysia adalah negara yang secara geografis terletak di kawasan Asia, sub-wilayah ASEAN, bahkan merupakan tetangga yang dapat dikatakan paling dekat, karena secara geografis pula hanya dibatasi dengan Selat Malaka dengan Wilayah paling barat Indonesia, Pulau Sumatra. Bahkan berbatasan secara langsung antara Pulau Kalimantan Indonesia dengan Wilayah Malaysia Timur (Sabah dan Serawak (di pimpin oleh seorang yang bergelar Yang Dipertuan Negeri/ Propinsi), Secara Histori pula Indonesia dan Malaysia pernah bersatu dibawah kerajaan Majapahit dan Sriwijaya.¹ Belum lagi secara rasiatik mempunyai nenek moyang yang sama yaitu pelaut dari Yunnan, China.

¹

Berbicara lebih jauh lagi secara sosial dan kultural kedua negara ini dapat dikatakan dekat hampir diseluruh kawasan nusantara. Seperti pengaruh budaya negara bagian Kelantan (dipimpin oleh seorang Sultan / Kesultanan) lebih dekat dengan suku Jawa terutama pada era kerajaan Majapahit pada abad 14. Kerajaan Aceh selama beberapa abad mendominasi Perak (Kesultanan), Bugis dari Pulau Sulawesi mengkolonisasi Selangor (Kesultanan) dan memerintah sepanjang semenanjung dari Kedah ke Johor (Kesultanan). Minangkabau di Sumatra mendapatkan kemerdekaan sendiri dari negeri yang kini disebut negeri Sembilan (Kesultanan)²

Dengan kedekatan ini tentu saja Indonesia berpeluang bagus untuk menjalin hubungan positif karena mempunyai banyak persamaan maupun ikatan senasib yang juga sama-sama merupakan negara yang pernah dijajah bangsa asing, Sehingga sangat wajar kedua negara saling menjalin hubungan positif baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya bahkan pertahanan dan keamanan.

Namun demikian harapan terkadang berbenturan dengan realita, hubungan positif antara Indonesia dan Malaysia ternyata pernah juga diancam misal; pada saat Orde Lama terjadi perseteruan di tahun 1963 dengan keluarnya provokasi Presiden Soekarno untuk berkonfrontasi dengan Malaysia.³

Suatu masa memang membawa sejarah tersendiri. Dimasa Orde Baru ketegangan cenderung menurun yang diwarnai dengan berbagai kerjasama. Salah satunya, pada saat itu Indonesia banyak mengirimkan tenaga pendidik untuk membantu memajukan kemajuan pendidikan di Malaysia. Di masa reformasi dan

transisi di Indonesia (awal 2000-an) ini ternyata muncul kembali hubungan yang tidak bisa dikatakan ideal diantara 2 negara tetangga ini. Semenjak peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2002, di sebuah Pabrik Tekstil berjangkaran internasional, Hualon Corporation yang terletak di kawasan Industri Nilai, Negeri Sembilan Malaysia.⁴ Kerusuhan ini ternyata menjadi isu aktual yang melibatkan buruh migran Indonesia yang mengadu nasib merantau ke Malaysia yang tidak dinafikan juga telah mensupport kemajuan ekonomi Malaysia, menjadi pemicu permasalahan dan kasus nasional kedua negara.

Permasalahan menjadi kompleks lagi setelah Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan Imigrasi baru yang banyak menimbulkan kontroversi baik dikalangan industri yang ternyata masih membutuhkan buruh migran Indonesia yang menurut mereka mudah bekerja sama karena mempunyai bahasa yang hampir mirip,⁵ yang dalam jumlah besar telah dideportasi oleh pemerintah Malaysia.

Dalam masalah ini sikap Pemerintah Indonesia cukup mengakomodasikan kerjasama dengan pemerintah Malaysia. Banyak pihak menuntut RI maupun Malaysia mensikapi permasalahan ini dengan arif. Kaum terpelajar dan yang berwenang mengetahui persis kualitas tenaga kerja Indonesia yang rendah, disamping Sumber Daya Manusia yang menangani kasus ini kurang memadai, Indonesia juga menghadapi keruwetan krisis dimensional internal bangsa Indonesia dimasa transisi ini, termasuk hajatan besar penyelenggaraan

.....

Dalam berbagai publikasi media pemerintah Indonesia secara internal telah berusaha mensikapi secara langsung dan tegas kasus ini. Terutama terhadap pihak kunci yaitu pelaku pengiriman buruh migran ke luar negeri yaitu PJTKI (Perusahaan Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang tidak bertanggungjawab. Secara eksternal kebijakan yang dilakukan antar pemerintah atau G to G hasilnya belum dirasakan membawa konsekuensi yang lebih positif pula, sehingga secara teknis menimbulkan permasalahan juga pada bisnis PJTKI sebagai penyalur sekaligus tidak dipungkiri juga, membantu pengurangan prosentase jumlah pengangguran di Indonesia yang makin membengkak.

Oleh karena itu penting sekali kebijakan bermutu yang diambil PJTKI untuk mengatasi problematika diatas sehingga dimungkinkan tidak menjadi kambing hitam atas permasalahan transnasional tersebut sehingga dapat mewujudkan harapan positif diberbagai tingkatan. Di tingkat lokal dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat bawah, di tingkat regional memberikan investasi bagi kemajuan ekonomi daerah, di skala nasional antara lain dapat mengurangi jumlah pengangguran, dalam skala hubungan bilateral membangun hubungan positif antara kedua negara yang terkait masalah ekonomi ini, dan pembauran kebudayaan nasional yang positif dalam skala global dapat terwujud.

Sekali lagi penulis yakin Kebijakan PJTKI yang tepat akan dapat membawa perubahan positif baik dalam skala lokal sampai pada skala Global, Sehingga studi kasus kebijakan pengiriman buruh migran Indonesia oleh PJTKI,

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

menjadi penting sebagai langkah awal membangun kesejahteraan buruh migran Indonesia yang pada saat ini masih sangat memprihatinkan.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA dalam rangka merespon dampak kebijakan pemerintah Malaysia pasca kerusuhan di pabrik Hualon Corporation 17 Januari 2002, dalam rangka pengiriman buruh migran Indonesia ke Malaysia ?
2. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang efektif bagi PJTKI dalam pengiriman buruh migran ke Malaysia ?.

C. HIPOTESIS

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan hipotesis tertentu karena penulis mengkondisikan penelitian ini dalam research eksploratif sehingga data yang dibutuhkan berupa informasi kebijakan akan dianalisa dan diolah sehingga cukup untuk digunakan menjawab rumusan masalah terkait juga dapat menghasilkan rekomendasi yang selain efektif juga ramah lingkungan dalam skup terkait. Namun tetap menggunakan kerangka pemikiran untuk hipotesis (pada paragraf selanjutnya) yang akan mengarahkan pada pemecahan rumusan masalah.

Dari uraian permasalahan diatas jelas bahwa PJTKI memegang ujung tombak dalam pengiriman buruh migran ke luar negeri. Sedangkan posisi DITKI

selalu dihubungkan secara otomatis dengan kondisi/fenomena buruh migran baik di tanah air maupun di negeri jiran itu sendiri. Padahal kondisi dan fenomena buruh migran sendiri secara umum diketahui tidak dapat dikatakan dalam kondisi baik, baik dari sudut pandang elit yang berpengaruh maupun masyarakat Indonesia dalam arti luas.

Maka dari itu untuk menjelaskan permasalahan vital PJTKI ini sekaligus menjadi solusi dari permasalahan yang dapat bermanfaat bagi semua pihak maka peneliti akan mencoba menganalisis kebijakan PJTKI yang sesuai dengan kondisi melalui pendekatan ilmu politik Harold D. Lasswell.

Dalam hal ini peneliti melihat bahwa sebuah kebijakan akan lebih tepat dapat dianalisa melalui sebuah penelitian kebijakan yang akan menjadi dasar bagi pemilihan kebijakan yang tepat.

Dalam sebuah penelitian kebijakan manfaat penelitian ini juga berorientasi pada pencarian alternatif rekomendasi kebijakan.⁶ Hal ini sangat sesuai dengan tujuan peneliti dalam mencari jawaban sesuai dengan rumusan permasalahan.

Menurut pemikiran penulis kebijakan sangat terkait dalam suatu proses politik sehingga pendekatan ilmu politik Lasswel perlu digunakan karena selain permasalahan terkait dengan analisa politik bagi Lasswel juga mempunyai pendapat mengenai analisa politik. ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan. " Analisa politik," menurutnya adalah "studi tentang perubahan-perubahan bentuk dan

⁶ Muhammad Sayuti, *Buku Panduan Penelitian*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, hal. 49

susunan pola nilai masyarakat." Adapun menurutnya nilai-nilai yang utama adalah, Keamanan, Pendapatan dan Martabat.⁷

Hal-hal tersebut jelas terkait dengan permasalahan PJTKI dimana keamanan, pendapatan, dan martabat mengarah menjadi issue sentral konflik buruh migran di pabrik Hualon sehingga menyebabkan Mahatir Muhammad menerapkan kebijakan keimigrasiannya yang otomatis juga harus diperhatikan oleh PJTKI sebagai sosok pengirim buruh migran Indonesia ke Malaysia.

Pendapatan (nilai ekonomis) juga merupakan nilai-nilai utama yang terkait karena semua pihak, secara riil baik dari buruh migran, PJTKI, pemerintah Indonesia dan Malaysia, maupun pengguna jasa buruh migran di Malaysia kesemuanya juga mengharap adanya nilai ekonomis bahkan positif dalam kerangka hubungan ini.

Selain hal tersebut permasalahan seputar Martabat (nilai-nilai kemanusiaan) juga menjadi pembicaraan publik akan dibahas karena dampak permasalahan yang terjadi akan terkait juga dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan, Baik di tingkat buruh migran, PJTKI, kedua bangsa, maupun pengguna jasa buruh migran di negeri Jiran.

Maka, dari uraian tersebut diatas Trilogi nilai Lasswell akan menjadi nilai dasar PJTKI dalam menjawab persoalan penting diatas menurut analisa penulis dan juga akan mengarahkan peneliti kepada jawaban rekomendasi kepada PJTKI sehingga pengiriman buruh migran ke luar negeri terutama ke negeri Malaysia khususnya pada sector industri (formal) maupun sector domestik (informal) dapat

⁷ Lasswell, H. A. (1950). *Value and Ethics*. New York: Oxford University Press.

dilakukan dengan pertimbangan ilmiah sehingga keputusan ataupun kebijakan PJTKI dapat memberikan keuntungan yang luas dari berbagai pihak seperti di kemukakan diatas. Jadi ketiga hal tersebut dianggap akan menjadi fokus nilai dasar PJTKI dalam studi penelitian kebijakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

D. TUJUAN PENULISAN

Adapun 2 tujuan utama penulisan penelitian ini yaitu;

1. Untuk mencoba mengeksplorasi dengan mengeksplanasikan secara lebih detail tentang kebijakan yang diambil oleh PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA dalam merespon adanya dampak kebijakan pemerintah Malaysia pasca kerusuhan di pabrik Hualon Corporation dalam rangka pengiriman buruh migran Indonesia ke Malaysia.
2. Memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif bagi PJTKI PT. Dharma KARYA RAHARJA dalam pengiriman buruh migran Indonesia ke Malaysia.

E. BATASAN PENGERTIAN

1. Yang dimaksud dengan Kerusuhan di pabrik tekstil Hualon Corporation adalah kerusuhan yang melibatkan buruh migran Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2002 yang merupakan pabrik tekstil berjangkauan

kejahatan juga menjadi sisi negatif yang muncul dari beragam aktivitas migrasi yang berlangsung. Catatan yang ditunjukkan oleh bagian investigasi negara tujuan (Malaysia) memperlihatkan bahwa aktivitas kejahatan yang dilakukan di kalangan migran relatif cukup tinggi meskipun kecenderungannya menunjukkan penurunan.⁸

Hubungan Malaysia dan Indonesia kembali diuji setelah terjadinya indikasi kejahatan dengan terjadinya bentrokan antara Polisi Diraja Malaysia dengan buruh migran Indonesia (BMI) di kawasan industri Nilai negeri Sembilan pada tanggal 17 Januari 2002, dan berlanjut di Cyberjaya, Kuala Lumpur tiga hari kemudian. Kerusuhan yang melibatkan sekitar 400 buruh migran Indonesia itu cukup untuk mengesahkan tindakan PM Mahathir Mohammad menutup pintu negerinya bagi buruh migran Indonesia. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Aceh Che Mat mengatakan, setidaknya 500.000 buruh migran asal Indonesia akan segera dipulangkan.⁹

Terlepas dari issue politis yang dapat mengarahkan pada provokasi berbagai pihak, ada baiknya menjadi perhatian bagi buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia yang memang disana menerapkan disiplin dan hukum lebih tegas dari pada negara Indonesia. Disamping itu juga Malaysia masih menjadi peluang besar bagi buruh migran Indonesia khususnya *skilled workers* yang memang selain diminati seperti telah disebutkan diatas juga diindikasikan lebih banyak dibutuhkan dari pada negara-negara lain yang menjadi tujuan pengiriman

buruh migran Indonesia ke luar negeri dilihat dari segi permintaan yang berkelanjutan.

Sehingga ketika terjadi pendeportasian ribuan buruh migran asal Indonesia, Malaysia sempat mengalami krisis tenagakerja. Indonesia sendiri justru pada saat itu menyetop pengiriman buruh migran ke Malaysia. Namun karena buruh migran Indonesia memang dibutuhkan di Malaysia, pengiriman buruh migran oleh PJTKI pada umumnya tetap berjalan. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya permintaan TKI yang dikirim secara legal di berbagai sector formal terutama industri, perkebunan dan konstruksi, disamping sector informal/ rumah tangga.¹⁰

Sektor ini memang dibutuhkan disana seperti yang ditekankan oleh Azizah Kasim, karena penduduk local tidak memilih bidang tersebut. Mereka lebih memilih sector formal atau sebagai pekerja pabrik dengan alasan mereka kurang atau tidak mau bekerja berpanas-panas di bawah sinar matahari seperti yang biasa dilakukan oleh pekerja konstruksi, ditekankan pula sector ini dapat dilihat orang banyak yang mungkin dapat menurunkan harga diri dan martabat mereka dimata masyarakat atau keluarga.¹¹

Sebagai peluang dibidang ketenagakerjaan pemerintah Indonesia akhirnya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal program pengiriman jasa TKI ke luar negeri, pemerintah (DEPNAKER) tidak berjalan sendiri, tetapi program tersebut diserahkan kepada biro-biro pengerahan jasa tenaga kerja

¹⁰ Kompas, 15 Agustus 2002.

¹¹ M. Arif Nasution, *Orang Indonesia di Malaysia: Menjual Kemiskinan Membangun Identitas*, 2001, Pustaka Pelajar, hal. 41

Dari kondisi tersebut banyak hal yang perlu dipahami dan diterapkan oleh PJTKI dalam hal ini PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA dalam pengiriman buruh migran Indonesia, agar tidak salah dalam mensikapi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia, dalam hal ini dimungkinkan akan muncul berbagai upaya strategis dalam hal terkait dan juga kerja sama dengan pihak-pihak terkait dan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kedua negara serta pembuat kebijakan lain dalam pengiriman buruh migran ke Malaysia.

G. LANDASAN TEORITIK

Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan teoritis. *Pertama*, Pendekatan Analisa Perkembangan Harold D. Lasswel dan *kedua*, Pendekatan Pembuatan Keputusan Richard C. Snyder.

Pendekatan Analisa Perkembangan ini akan dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan yang pertama tentang bagaimana upaya yang dilakukan PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA dalam rangka merespon dampak kebijakan pemerintah Malaysia pasca kerusuhan di pabrik Hualon Corporation dalam pengiriman buruh migran Indonesia.

Dalam pendekatan Analisa Perkembangan, Harold D. Lasswel menekankan pada proses pembuatan keputusan. Menurutnya suatu keputusan adalah hasil dari interaksi dalam arena politik. Sedangkan pembuatan keputusan yang rasional menurutnya menyangkut tiga hal: *pertama*, mengenai kejelasan konsep dan tujuannya. *Kedua*, mengenai keseksamaan perhitungan

kemungkinan. *Ketiga*, mengenai penerapan pengetahuan tentang cara dan alat-alat yang tersedia secara jitu.¹⁴

Lebih detailnya seperti yang dikemukakan juga oleh guru besar ilmu politik Universitas Jawaharlal Nehru, New Delhi S. P. Varma. Akan digunakan pula tipe-tipe pemikiran yang melibatkan komponen perilaku pengambilan keputusan yang meliputi pemikiran tujuan, pemikiran kecenderungan dan pemikiran ilmiah yang nantinya juga akan diperlakukan secara beda satu sama lain.

Adapun pengertian dari pola pemikiran diatas adalah “ pemikiran tujuan”, dalam hal ini berhubungan dengan analisa dan seleksi nilai-nilai atau sasaran – sasaran PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA yang akan dituju dan keputusan yang diarahkan kepadanya .

Pemikiran kecenderungan mencakup analisa kecenderungan masa lalu dan kemungkinan-kemungkinan masa yang akan datang yang menjadi kecenderungan dan akan dikembangkan oleh PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA. Sedangkan Pemikiran ilmiah mengacu pada kondisi-kondisi yang membatasi melalui penerapan keahlian yang memadai sesuai dengan standar kompetensi maupun keunggulan lain yang ditawarkan oleh PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA.

Sedangkan pendekatan pembuatan Keputusan Richard C. Snyder akan digunakan untuk memudahkan membuat suatu rekomendasi kebijakan yang efektif bagi PJTKI dalam pengiriman buruh migran ke Malaysia.

¹⁴ S.P Varma, *op. cit.*, hal. 261-262

Menurut Snyder, proses pembuatan keputusan terdiri dari tiga sub-kategori pokok: (1) Bidang Kemampuan (2) Komunikasi dan Informasi, dan (3) motivasi.¹⁵ Sub-sub kategori meliputi peran, norma dan fungsi yang ada di dalam pemerintah pada umumnya dan khususnya unit yang membuat keputusan dalam hal ini PJTKI yang mengirim buruh migran ke Malaysia.

Dalam hal ini PJTKI nantinya akan dipandang sebagai unit yang membuat keputusan. Dimana keputusan akan mempertimbangkan juga mengenai sub kategori peran, norma dan fungsi PJTKI secara lebih jeli. Sehingga dari data-data factual yang dikumpulkan dan telah dianalisis akan tercipta rekomendasi yang tepat bagi PJTKI dalam pengiriman buruh migran Indonesia ke Malaysia.

Melalui pendekatan analisis perkembangan Harold D. Laswell diharapkan dapat menemukan point-point yang tegas untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat empirik mengenai hasil pembahasan mengenai Bagaimana upaya yang dilakukan PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA dalam rangka merespon dampak kebijakan pemerintah Malaysia pasca kerusuhan di pabrik Hualon Corporation dalam pengiriman buruh migran Indonesia.

Disamping itu dengan kajian teoritik yang berasal dari Snyder dapat dipergunakan untuk membuat/merumuskan rekomendasi bagi PJTKI yang mengirim buruh migran ke Malaysia. Dalam penelitian ini diharapkan akan tercapai penyelesaian masalah yang efektif karena permasalahan diselesaikan baik dengan pendekatan yang bersifat cenderung rasional maupun pendekatan yang

1. Analisis Situasi: Analisis situasi dimana akan memberikan titik pandang untuk

melengkapi sebuah penyelesaian masalah dimana kedua ilmuwan politik juga tidak lepas dari kritikan ilmuwan politik lain.

H. JANGKAUAN PENELITIAN

Adapun temuan penelitian yang dilakukan dapat diberlakukan pada pembuatan keputusan dalam hal ini dengan unit penelitian PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA yang berinteraksi dalam arena politik baik dengan negara Malaysia maupun Indonesia, buruh migran, maupun pihak lain yang terlibat didalam pengiriman buruh migran ke luar negeri. Sedangkan rekomendasi dapat digunakan sebagai pedoman yang efektif bagi PJTKI dalam pengiriman buruh migran ke Malaysia.

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan mendukung analisis yang tajam, dilakukan dengan melengkapi referensi yang ada, wawancara dengan nara sumber maupun mantan buruh migran Indonesia di Malaysia, serta melakukan penelitian dan pengamatan secara Langsung.

Adapun Lokasi yang dipilih penulis antara lain sbb:

1. PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA

Adapun pertimbangan penulis memilih PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA dalam studi kasus ini karena:

- (1) Sudah cukup lama berdiri yaitu pada tanggal 16 September 1994, sedangkan kondisi umum PJTKI di Indonesia pada saat itu sedang mengalami penertiban dan baru ada satu PJTKI yang memiliki SHIP yaitu PT. DHARMA KARYA RAHARJA milik Pemerintah. Sedangkan SHIP

pertama PT. DHARMA KARYA RAHARJA didapat tanggal 15 Maret 1995. Dalam asumsi penulis PJTKI tersebut berpengalaman dan mampu menganalisa dan merencanakan pengiriman buruh migran secara legal ke luar negeri baik formal maupun informal.

- (2) PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA tahun 2000 menunjukkan komitmen untuk memilih Malaysia sebagai negara penerima sebagian besar buruh migran yang telah dibina. Dan mengadakan kendali alokasi bagi pengiriman buruh migran di sector informal.
- (3) Mempunyai visi, misi, dan tujuan yang jelas, disamping manajemen yang unik. Selain pengamatan langsung, penulis juga melakukan wawancara dengan pimpinan PT. DKR maupun, IT Asrama, Pengajar maupun calon buruh migran yang akan diberangkatkan ke Malaysia.

Alamat: Jl. RC. Veteran No. 11 F, Bintaro Jakarta Selatan (12330)

Phone: (62-21) 7352151, Fax.: (62-21) 7532150, E-mail: pt

dkr@rad.net.id, Website: <http://www.dkr.com.my>

2. DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

Di sini penulis mendapatkan informasi aktual pemerintah Republik Indonesia dalam hal perburuan, kasus buruh migran Indonesia, *cross check* data/laporan data PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA, sistem informasi

Hukum LN. Bidang Penanganan Kasus TKI, Bagian sistem informasi, dan Bagian Lit Bang Depnaker Trans RI di Kalibata, Jakarta.

Alamat: Kantor Pusat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Telp. 5251086

Fax. (021) 5255628 Jakarta 12950.

3. KEDUTAAN BESAR MALAYSIA & Konsulat Malaysia di Indonesia.

Penulis mendapatkan informasi seputar Negara Malaysia yang aktual juga mendapatkan informasi seputar kebijakan Pemerintah Malaysia seputar buruh migran Indonesia melalui Penasehat kedutaan (Konsuler, Imigresen, dan Tenaga Kerja) Kedutaan Besar Malaysia dan data referensi peta jalan kota terbaru di Malaysia.

Alamat: Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X/6 No. 1-3, Jakarta. Telp: (021)

5224947. Fax: (021) 5224974.

4. INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION Jakarta (ILO)

Penting diketahui bahwa baik negara Indonesia maupun Malaysia menandatangani konvensi perburuhan PBB. Dari referensi yang ada juga, penulis mendapatkan Informasi perburuhan/buruh migran baik local maupun global yang menjadi *trend-setter* bagi pertumbuhan baik kuantitas maupun kualitas buruh migran ke depan, Rencana Ketenagakerjaan baik negara Indonesia maupun Malaysia dan hal-hal lain yang terkait dengan studi yang dilakukan

I. METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA.

Penelitian ini memberikan porsi yang besar pada data primer. Adapun pengumpulan data primer dilakukan dengan tehnik wawancara mendalam dengan Pimpinan PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA, dengan menyiapkan perangkat daftar pertanyaan. Data pelengkap lain dari hasil wawancara yang dibutuhkan dari nara sumber juga menjadi bahan yang dipertimbangkan oleh penulis. Data yang dibutuhkan antara lain:

1. Data yang terkait dengan Kebijakan PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA dalam pengiriman buruh migran ke Malaysia terutama pasca kerusuhan di pabrik Hualon Corporation Malaysia, tahun 2002 hingga tahun 2004 dan data-data terkait yang mendukung.
2. Manajemen Umum, Manajemen Operasional, Manajemen Pemasaran PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA.
3. Sejarah, visi, misi dan motivasi yang dikembangkan dan di terapkan oleh PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA.
4. Kebijakan aktual pemerintah Malaysia pasca kerusuhan di Pabrik Hualon Corporation, Malaysia terkait dengan buruh migran Indonesia.
5. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengkoordinasikan sistem pengiriman buruh migran Indonesia ke Malaysia.

Selain itu untuk menjamin bahwa informasi yang diperoleh valid dan reliabel maka digunakan juga data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka baik dari literatur yang terdapat maupun dokumentasi media massa yang

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif terutama pada aspek yang terkait dengan:

1. Analisis Kebijakan PT. DHARMA KARYA RAHARJA dalam pengiriman buruh migran ke Malaysia, pra-pasca kerusuhan di pabrik Hualon Corporation 17 Januari tahun 2002, hingga tahun 2004.
2. Analisis terhadap manajemen yang dilakukan oleh PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA.
3. Analisis terhadap Sejarah, Visi, Misi, dan motivasi yang dikembangkan oleh PJTKI DHARMA KARYA RAHARJA.

Penyusunan kesimpulan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data empirik sehingga dapat diketahui kebijakan-kebijakan penting dalam pengiriman buruh migran ke Malaysia yang dapat diterapkan oleh PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA. Penetapan rekomendasi kebijakan yang lebih operasional didasarkan pada analisis yang bersifat empirik dan fenomenal sehingga memberikan solusi atas kebijakan yang efektif bagi pengiriman buruh migran Indonesia ke Malaysia oleh PJTKI pada umumnya.

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu: Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini akan memuat unsur metodologis dalam penelitian kebijakan yang berisi, latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah yang menunjukkan permasalahan yang terkait dengan kebijakan, tujuan penelitian, landasan teoritis yang digunakan, pendekatan penelitian, rancangan

penelitian, tehnik pengumpulan data, metode analisa data yang digunakan, beserta sistematika penulisan sebagai pedoman penyusunan bab berikutnya. Bab pendahuluan ini sebagai deskripsi umum dalam skripsi ini.

Bab kedua, mengeksplorasi topik utama bab kedua "*Kebijakan pemerintah Malaysia pasca kerusuhan di pabrik Hualon Corporation Malaysia pada 17 Januari 2002*". Dalam bab ini akan dieksplanasikan kebijakan pemerintah Malaysia dalam merespon peristiwa tersebut, Kebijakan utama yang terkait dengan hal-hal yang menentukan kesejahteraan buruh migran yang bekerja di Malaysia antara lain kebijakan terkait dengan permasalahan hukum yang diterapkan kepada tenaga kerja pada umumnya dan buruh migran pada khususnya beserta kasus yang sering terjadi dan penyelesaiannya, Kebijakan yang terkait dengan kebijakan politik Malaysia dalam menentukan arah kebijakan ketenaga kerjaan di Malaysia dari kebijakan yang bersifat individual, nasional terkait dengan Serikat Pekerja dan kebijakan Luar Negeri pemerintah Malaysia, Kebijakan ekonomi Malaysia yang dapat menentukan nilai ekonomis kerja di negeri Jiran, dan kebijakan terkait dengan sosial budaya negara Malaysia.

Bab ketiga, membahas topik "*Kebijakan PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA dalam Pengiriman Buruh Migran Ke Malaysia*" dalam hal ini akan dibahas Kebijakan yang dilakukan oleh PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA dalam pengiriman buruh migran baik formal maupun informal dari aspek sejarah, visi, misi dan motivasi yang dikembangkan dan diterapkan oleh PT. DKR, aspek kebijakan menejemen umum, menejemen operasional, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan dalam pengiriman buruh migran serta aspek

kebijakan dalam pengiriman buruh migran lainnya untuk mengatasi kasus-kasus yang terjadi.

Bab keempat membahas mengenai topik "*kebijakan-kebijakan yang dilakukan PJTKI. PT. DHARMA KARYA RAHARJA dalam merespon dampak kebijakan pemerintah Malaysia pasca kerusuhan di parik Hualon Corporation 2002.*" Dalam hal ini akan dibahas analisa terhadap hal-hal penting yang dilakukan PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA khususnya dalam mengatasi permasalahan pengiriman buruh migran ke Malaysia, serta dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan khas PJTKI yang mungkin akan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai kelebihan yang ada.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari kajian bab-bab sebelumnya ditambah dengan rekomendasi bagi PJTKI PT. DKR dan pihak lain sekiranya memegang peran penting dalam pengiriman buruh migran ke Malaysia sehingga dapat memberikan kesejahteraan bersama baik bagi buruh migran itu sendiri, PJTKI, bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia, maupun pihak yang berkepentingan.

Alamat: Menara Thamrin, Level 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta
10250. P.O. Box 1075, Jakarta 10010, INDONESIA.

5. ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

Referensi yang menjadi hal utama bagi penulis di sini selain Kebijakan Pemerintah Malaysia, maupun Kebijakan Pemerintah Indonesia, adalah peraturan-peraturan, Diplomasi, Sosial-Budaya, yang dapat digunakan untuk memudahkan buruh migran Indonesia untuk beradaptasi dengan kondisi kerja di Malaysia yang dapat secara detail ditemukan disini.

Alamat: The ASEAN Secretariat 70 A, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta
12110.

Adapun Waktu Penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Jangka waktu penelitian utama akan dimulai dari tahun 2002 hingga tahun 2004. Waktu Penelitian tersebut dipertimbangkan karena terkait dengan peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2002, Sehingga data yang diambil untuk dianalisa sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Adapun untuk data yang lebih mendalam diambil data-data literer yang terkait hingga data terbaru tahun 2004. Sedangkan Untuk penelitian/ Pengamatan terhadap PT. DHARMA KARYA RAHARJA dilakukan pada bulan Juni 2004, dengan pertimbangan selain kematangan evaluasi juga pada bulan ini PJTKI PT. DHARMA KARYA RAHARJA sedang aktif dalam pembinaan dan pengiriman buruh migran Indonesia ke Malaysia.

Indonesia (BPJTKI) yang telah mendapat legalisasi usaha dari pemerintah. Biro-biro tersebut selanjutnya berkewajiban memberikan laporan secara berkala berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan termasuk berbagai persoalan tenaga kerja yang dihadapi.¹²

Peran PJTKI yang mengirimkan buruh migran secara legal rupanya sedikit membantu tugas pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan ini. Untuk itu usaha pemerintah semakin inten.

Dengan adanya rekomendasi pemerintah Indonesia yang akan menghentikan penempatan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia jika sampai Maret 2004 jika nota kesepahaman (*memorandum of Understanding*) antara Indonesia dan Malaysia tidak ditandatangani. Langkah tersebut diambil karena tanpa nota kesepahaman Pemerintah Indonesia tidak mampu mengendalikan proses penempatan TKI illegal ke negeri Jiran yang sering menimbulkan masalah seperti yang ditegaskan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Jacob Nuwa Wea.

Keberadaan nota kesepahaman (MoU), Kata Nuwa Wea sangat dibutuhkan untuk menekan jumlah TKI yang bekerja secara illegal di negara tersebut. Dengan adanya MoU, semua TKI yang masuk dan bekerja di Malaysia harus ditempatkan oleh Perusahaan jasa TKI (PJTKI) atas rekomendasi Depnaker. "Langkah ini untuk memperketat penempatan ke Malaysia karena kualitas dan usia TKI sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah negara tersebut," ujarnya.¹³

¹² Abdul Haris, *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional : dari Perbudakan ke Perdagangan Manusia*, 2002, LESFI, hal.72

¹³ *Kompas*, Minggu, 12 Februari 2004, hal.14